

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023

JL.DEPATI SAID No. 01 Kelurahan. TAPAK LEBAR

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL.DEPATI SAID No. 01 Kelurahan. TAPAK LEBAR

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat IIKota

Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. www.pn-lubuklinggau.go.id, pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

Nomor : 226/SEK.W6.U5/KU.07/02/2024 Lubuklinggau, 15 Februari 2024

Lampiran : 1 Bundel

Perihal : Laporan Keuangan Tahun 2023
DIPA 098970

Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
LubuklinggauDi Lubuklinggau

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2023 yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan TA 2023;
- b. Lampiran Laporan Keuangan cetakan Monsakti Per tanggal 31Desember 2023.

Demikian atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Patra Sukma, S.Kom., SH., MH
NIP 197907092009041002

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Peradilan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lubuklinggau, 31 Desember 2023

Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Lubuklinggau



PATRA SUKMA, S.Kom., S.H., M.H
NIP-197907092009041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xiii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuklinggau	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	16
B.3 Belanja Barang	17
B.4 Belanja Modal.....	18
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	18
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	19
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	19

B.4.4 Belanja Modal Lainnya	20
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	20
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	20
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	20
C.3 Piutang Bukan Pajak	20
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	21
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	21
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	22
(TGR).....	22
C.7 Persediaan.....	22
C.8 Persediaan Yang Belum Diregister	23
C.9 Tanah.....	23
C.10 Peralatan dan Mesin	28
C.11 Gedung dan Bangunan	28
C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan	29
C.13 Aset Tetap Lainnya.....	29
C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	30
C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
C.16 Piutang Tagihan TP/TGR	31
C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	31
C.18 Aset Tak Berwujud	31
C.19 Aset Lain–Lain	32
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	32
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga.....	33
C.22 Pendapatan Diterima di Muka.....	33
C.23 Uang Muka dari KPPN	34
C.24 Ekuitas	34
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	36

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	36
D.2 Beban Pegawai	36
D.3 Beban Persediaan	37
D.4 Beban Barang dan Jasa	37
D.5. Beban Pemeliharaan	38
D.6 Beban Perjalanan Dinas	39
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	40
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	41
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	41
E.1 Ekuitas Awal	41
E.2 Defisit LO.....	41
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	41
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	41
E.5 Koreksi Lain-lain	41
E.6 Transaksi Antar Entitas.....	41
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	42
E.6.2 Transfer keluar	42
E.7 Ekuitas Akhir	42
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	203
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	203
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	203
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	203

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	13
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2022 dan TA 2023.....	14
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Desember 2023	14
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2023.....	16
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2023	16
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan TA 2023	17
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan TA 2023	18
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2023	18
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2023	19
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2022 dan TA 2023	19
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2023	20
Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	20
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	20
Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2023....	21
Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	22
Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2023	22
Tabel 18. Rincian Persediaan	23
Tabel 19. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2023	25
Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	33
Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	36
Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	37
Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	37
Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	38
Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	38
Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	39
Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	40
Tabel 29. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	40
Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	41

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jl. Depati Said No. 1 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II

Telp. 0733 321570 Fax. 0733 321570 Kode Pos 31616

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Semester I Tahun 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuklinggau, 31 Desember 2023

Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Lubuklinggau



PATRA SUKMA, S.Kom., S.H., M.H
NIP-197907092009041002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode per 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 12.160.414,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp 9.660.000,00 atau mencapai 125,88 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2023 adalah sebesar Rp 8.351.701.184,00 atau mencapai 62,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.397.210.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Februari 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 14.952.389.960,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 80.000,00; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 14.952.389.960,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.182.480 dan Rp 14.951.287.480,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 12.160.414,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 8.131.809.055,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 8.119.648.641,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp (Rp 8.119.648.641,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 14.663.522.351,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp 8.119.648.641,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp 0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 8.407.413.770,00 sehingga kenaikan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 287.765.129. Ekuitas akhir sebesar Rp. 14.951.287.480,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	9.660.000,00	12.160.414,00	125,88	3.185.000,00	11.526.060,00	361,89
Jumlah Pendapatan		9.660.000,00	12.160.414,00	125,88	3.185.000,00	11.526.060,00	361,89
BELANJA							
BELANJA PEMERINTAH PUSAT							
1. Belanja Pegawai	B.2	5.650.293.000,00	5.649.377.299,00	99,98	4.702.680.000,00	4.628.281.182,00	98,42
2. Belanja Barang	B.3	1.901.787.000,00	1.858.317.885,00	97,71	2.066.155.000,00	2.039.383.856,00	98,70
3. Belanja Modal	B.4	845.130.000,00	844.006.000,00	99,87	114.000.000,00	113.238.000,00	99,33
Jumlah Belanja		8.397.210.000,00	8.351.701.184,00	99,46	6.882.835.000,00	6.780.903.038,00	98,52

NERACA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		TA 2023	TA 2022
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C. 3		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)			-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	-
Persediaan	C. 7	80.000	80.000
Persediaan yang Belum Diregister	C. 8		
Jumlah Aset Lancar		80.000	80.000
Aset Tetap			
Tanah	C. 9	7.065.673.000	7.065.673.000
Peralatan dan Mesin	C. 10	3.346.716.757	2.549.335.757
Gedung dan Bangunan	C. 11	8.659.430.000	8.659.430.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 12		
Aset Tetap Lainnya	C. 13	228.341.630	228.341.630
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 14		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 15	(4.347.771.427)	(3.826.667.556)
Jumlah Aset Tetap		(14.952.389.960)	(14.676.102.831)
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 16		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 17	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 18	39.532.500	39.532.500
Aset Lain-Lain	C. 19		
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 20	(39.532.500)	(39.532.500)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		(14.952.469.960)	(14.676.182.831)
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga I	C. 21	1.182.480	12.660.480
Utang yang belum ditagihkan	C. 22		
Uang Muka dari KPPN	C. 23		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.182.480	12.660.480
JUMLAH KEWAJIBAN		1.182.480	12.660.480
EKUITAS			
Ekuitas	C. 24	14.951.287.480	14.663.522.351
JUMLAH EKUITAS		14.951.287.480	14.663.522.351
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		14.952.469.960	14.676.182.831

LAPORAN OPERASIONAL

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN OPERASIONAL
31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		12.160.414	11.526.060
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	12.160.414	11.526.060
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	5.638.115.299	4.633.091.182
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	68.217.000	62.692.500
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	836.956.783	918.501.662
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	869.709.985	955.058.700
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	77.093.117	88.891.447
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	641.716.871	632.275.639
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8		
JUMLAH BEBAN		8.131.809.055	7.290.511.130
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.119.648.641)	(7.278.985.070)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.119.648.641)	(7.278.985.070)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(8.119.648.641)	(7.278.985.070)

PERUBAHAN EKUITAS

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2023 DAN 30 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	14.663.522.351,00	15.151.561.343,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(8.119.648.641,00)	(7.278.985.070,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			(43.353.400,00)
EKUITAS			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			(29.860.000,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4		(13.493.400,00)
Koreksi atas reklasifikasi	E. 5		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	8.407.413.770,00	6.834.299.478,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		287.765.129,00	(488.038.992,00)
EKUITAS AKHIR	E. 7	14.951.287.480,00	14.663.522.351,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Negeri
Lubuklinggau*

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2015-2023 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2023.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

Visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau mewujudkan :

- a. Terpenuhinya sumber daya manusia Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya yang profesional dan berintegritas.
- b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai.

- c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau:

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi peradilan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.
9. Meningkatkan penatausahaan aset negara.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan

aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

Akuntansi

atas

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2023	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	9.660.000	9.660.000
Jumlah Pendapatan	9.660.000	9.660.000
Belanja		-
Belanja Pegawai	5.650.293.000	5.650.293.000
Belanja Barang	1.901.787.000	1.901.787.000
Belanja Modal	845.130.000	845.130.000
Jumlah Belanja	8.397.210.000	8.397.210.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan Rp
12.160.414,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 12.160.414,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 9.660.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2023		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-		
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.660.000,00	12.160.414,00	125,88
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin		-	
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya		-	
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
Jumlah Pendapatan Bruto		9.660.000,00	12.160.414,00	125,88
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		9.660.000,00	12.160.414,00	125,88

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 634.081,00 dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat kenaikan dalam pemanfaatan aset, baik itu pemindahtanganan, sewa, maupun pemanfaatan aset lainnya.
2. Terdapat kenaikan dalam penerimaan kembali belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja lainnya.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan TA 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			-	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.160.141,00	11.526.060,00	634.081,00	5,50
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain			-	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu				
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu				
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu				
pendapatan Netto	12.160.141,00	11.526.060,00	634.081,00	5,50

Belanja

Realisasi
Belanja
Negara Rp
7.291.180.375,00

Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 7.291.180.375,00 atau 62,00% dari anggaran belanja sebesar Rp 7.296.929.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	5.635.371.000,00	5.635.323.962,00	100,00
52	Belanja Barang	816.428.000,00	811.850.395,00	99,44
53	Belanja Modal	845.130.000,00	844.006.000,00	99,87
Jumlah Belanja Bruto		7.296.929.000,00	7.291.180.357,00	99,92
Pengembalian Belanja		-		
Jumlah Belanja Netto		7.296.929.000,00	7.291.180.357,00	99,92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.837.179.895,00 atau sebesar 33.68 % dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Rincian penyebab kenaikan belanja akan dijelaskan dalam masing-masing jenis belanja.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022*(dalam rupiah)*

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	5.635.323.962,00	4.628.281.667,00	1.007.042.295,00	21,76
52	Belanja Barang	811.850.395,00	742.340.795,00	69.509.600,00	9,36
53	Belanja Modal	844.006.000,00	83.378.000,00	760.628.000,00	912,26
Jumlah Belanja Netto		7.291.180.357,00	5.454.000.462,00	1.837.179.895,00	33,68

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp
5.636.323.962,00

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.635.323.962,00 dan Rp 4.628.281.667,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp 1.007.042.295 atau 21,76% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2022. Penurunan ini disebabkan antara lain :

- Terdapat kebijakan baru terkait adanya Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) THR;
- Terdapat kenaikan jumlah mutasi pegawai.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.898.329.000,00	1.659.912.000,00	238.417.000,00	14,36
Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.000,00	31.000,00	1.000,00	3,23
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	143.738.000,00	126.283.000,00	17.455.000,00	13,82
Belanja Tunj. Anak PNS	47.886.000,00	45.638.000,00	2.248.000,00	4,93
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.320.000,00	40.800.000,00	(480.000,00)	(1,18)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.714.200.000,00	2.129.990.000,00	584.210.000,00	27,43
Belanja Tunj. PPh PNS	322.527.000,00	252.515.000,00	70.012.000,00	27,73
Belanja Tunj. Beras PNS	114.859.000,00	113.451.000,00	1.408.000,00	1,24
Belanja Uang Makan PNS	327.690.000,00	306.640.000,00	21.050.000,00	6,86
Belanja Tunjangan Umum PNS	25.790.000,00	27.420.000,00	(1.630.000,00)	(5,94)
Belanja Uang Lembur	-	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	5.635.371.000,00	4.702.680.000,00		
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	5.635.371.000,00	4.702.680.000,00		

Belanja

Barang Rp

1.858.317.885,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.858.317.885,00 dan Rp 2.039.383.856,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp 181.065.971,00 atau 8,88% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2022. Penurunan ini diakibatkan berkurangnya biaya pemeliharaan dan biaya sewa.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	811.850.395,00	742.340.795,00	69.509.600,00	9,36
Belanja Barang Non Operasional	6.125.000,00	-	6.125.000,00	
Belanja Barang Persediaan	68.292.000,00	88.216.500,00	(19.924.500,00)	(22,59)
Belanja Jasa	25.322.388,00	190.442.914,00	(165.120.526,00)	(86,70)
Belanja Pemeliharaan	869.634.985,00	929.492.200,00	(59.857.215,00)	(6,44)
Belanja Perjalanan Dinas	77.093.117,00	88.891.447,00	(11.798.330,00)	(13,27)
Realisasi Belanja Bruto	1.858.317.885,00	2.039.383.856,00	(181.065.971,00)	(8,88)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	1.858.317.885,00	2.039.383.856,00	(181.065.971,00)	(8,88)

Realisasi Belanja
Modal Rp
844.006.000,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 844.006.000,00 dan Rp 113.238.000,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp 730.768.000,00 atau 645,34% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2022. Kenaikan ini dikarenakan terdapat penyesuaian sarana dan prasarana untuk menunjang pencapaian Tugas Pokok dan Fungsi.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	844.006.000,00	83.378.000,00	760.628.000,00	912,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	29.860.000,00	(29.860.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	844.006.000,00	113.238.000,00	730.768.000,00	645,34
Pengembalian	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Netto	844.006.000,00	113.238.000,00	730.768.000,00	645,34

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 844.006.000,00 dan Rp 83.378.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak mengalami kenaikan sebesar Rp 760.028.000,00 atau 912,26% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2022.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	844.006.000,00	83.378.000,00	760.628.000,00	912,26
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	-	-	-	
Realisasi Belanja Bruto	844.006.000,00	83.378.000,00	760.628.000,00	912,26
Pengembalian	-	-	-	
Realisasi Belanja Netto	844.006.000,00	83.378.000,00	760.628.000,00	912,26

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2022.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp
0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00,. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember TA 2022
1.	Uang Persediaan per 30 Juni 2023	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dikarenakan tidak adanya pelunasan persekot. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis	TA 2023	TA 2022
1.	Persekot Gaji	-	-
JUMLAH		-	-

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp 1.182.480,00

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 1.182.480,00 dan Rp 0,00,. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang Bukan Pajak Rp 1.182.480,00

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 1.180.480,00 dan sebesar Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 14. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. tidak terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 15. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA2022
1.	-	-	-
JUMLAH		-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp0,00

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing.

Tabel 16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

Persediaan Rp. 80.000,00

C.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 80.000,00 dan Rp 80.000,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2023	Mutasi	TA 2022
1	Barang Konsumsi	80.000,00	-	80.000,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		80.000,00	-	80.000,00

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan. Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp 0,00 dan tidak disajikan dalam neraca pada persediaan.

Persediaan yang belum diregister
Rp 0,00

C.8 Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Adapun rincian atas persediaan yang belum diregister adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Belum di GU kan	(17,420,788.00)
2	Belum di GU kan	(85,384,970.00)
Total		(102,805,758.00)

Tanah Rp
7.065.673.000,00

C.9 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuklinggau per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 7.065.673.000,00 dan Rp 7.065.673.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	7.065.673.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	7.065.673.000,00

Tabel 18. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2023

Identitas BMN					Nilai Buku			Kenaikan/ (Penurunan)	Koreksi SIMAK*)
Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Nilai Admin	Nilai Invent	Nilai Wajar		
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(4)	(8)=(10+11+12+13+14)
098970	Pengadilan Negeri Lubuklinggau	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	54.264.000	54.264.000	403.194.000	348.930.000	348.930.000
098970	Pengadilan Negeri Lubuklinggau	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3	210.000.000	210.000.000	590.987.000	380.987.000	380.987.000
098970	Pengadilan Negeri Lubuklinggau	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4	364.875.000	364.875.000	1.558.197.000	1.193.322.000	1.193.322.000
098970	Pengadilan Negeri Lubuklinggau	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	5	73.440.000	73.440.000	530.292.000	456.852.000	456.852.000
098970	Pengadilan Negeri Lubuklinggau	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	462.060.000	462.060.000	3.983.003.000	3.520.943.000	3.520.943.000
TOTAL TANAH					1.164.639.000	1.164.639.000	7.065.673.000	5.901.034.000	5.901.034.000

Peralatan dan
Mesin Rp
6.669.000,00

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 3.346.716.757,00 dan Rp 2.549.335.757 ,.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	2.549.335.757
Pembelian	255.953.000
Jumlah Mutasi Tambah	255.953.000
Transfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	255.953.000
Saldo per 30 Juni 2022	
Akumulasi Penyusutan	(2.157.108.875)
Nilai Buku Mutasi tambah	648.179.882

Gedung dan
Bangunan Rp
8.659.430.000,,
00

C.11 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 8.659.430.000,00 dan Rp 8.659.430.000,,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	8.659.430.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2023	8.659.430.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.507.028.334,00)
Nilai Buku	7.152.401.666,00

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp 0,00

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022
Jumlah Mutasi Tambah
Jumlah Mutasi Kurang
Jumlah Mutasi
Saldo per 31 Desember 2023

Aset Tetap
Lainnya Rp
228.341.630,00

C.13 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 228.341.630,00 dan Rp 228.341.630,00, tidak terdapat kenaikan

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	228.341.630,00
Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	228.341.630,00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	228.341.630,00

Tidak adanya Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang terjadi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Konstruksi
 Dalam
 Pengerjaan Rp
 0,00

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja dibawah lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Perolehan KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	-

Tidak ada Mutasi tambah KDP yang terjadi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Akumulasi
 Penyusutan
 Aset Tetap Rp
 4.347.771.427,0
 0

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp 4.347.771.427,00 dan Rp 3.826.677.556,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 195.595.274,00 atau 5,11%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan kenaikan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.16 Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang Tagihan
TP/TGR Rp 0,00

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1.	-	-	-
JUMLAH		-	-

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 tidak menggambarkan mutasi yang sebenarnya dikarenakan terdapat kesalahan akun dalam penyeteroran, ralat akun tersebut akan diselesaikan pada Rekonsiliasi bulan Agustus 2022.

Rincian nilai yang seharusnya adalah :

Uraian	Nilai TGR	Angsuran	TA 2023
-	-	-	-

C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022.

Penyisihan

Piutang Tidak

Tertagih -

Tagihan TP/TGR

Rp 0,00

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1.	PT. Amoraindo Utama Karya	Lancar	174,845,880	0,50%	874,229
Total			174,845,880.00		874,229

C.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 39.532.500,00 dan Rp 39.532.500,00.

Aset Tak

Berwujud Rp

39.532.500,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Negeri Lubuklinggau berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	39.532.500,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	39.532.500,00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	39.532.500,00

C.19 Aset Lain–Lain

*Aset Lain-Lain
Rp 0,00*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 00,00%. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	-
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	-

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp 0,00*

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan kenaikan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	10,143,724,647.00	(9,304,167,537.00)	839,557,110.00
2	Aset Lain-Lain	2,748,534,960.00	(2,178,305,022.00)	570,229,938.00
Jumlah		12,892,259,607.00	(11,482,472,559.00)	1,409,787,048.00

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp 1.182.480,00

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.182.480,00 dan Rp 12.660.480. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
NIHIL			

Pendapatan Diterima Dimuka Rp 0,00

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Jumlah
NIHIL		

Uang muka dari
KPPN Rp 0,00

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp
14.952.469.960,
00

C.24 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 14.952.469.960,00 dan Rp 14.676.182.831,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp 12.160.414,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 12.160.414,00 dan Rp 11.526.060,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 20. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	12.160.414,00	11.526.060,00	5,50
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		12.160.414,00	11.526.060,00	5,50
Pendapatan Lain-Lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	0,00	0,00	100,00
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	100,00
Total		12.160.414,00	11.526.060,00	5,50

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari sewa gedung dan bangunan pada Gedung Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati said No. 1.

Beban Pegawai Rp
5.638.115.299,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.638.115.299,00 dan 4.633.091.182,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.898.312.900,00	1.659.912.000,00	14,36
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	32.000,00	31.000,00	3,23
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	143.738.000,00	126.283.000,00	13,82
4	Beban Tunj. Anak PNS	47.886.000,00	45.638.000,00	4,93
5	Beban Tunj. Struktural PNS	40.320.000,00	40.800.000,00	(1,18)
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.714.200.000,00	2.129.990.000,00	27,43
7	Beban Tunj. PPh PNS	322.527.000,00	252.515.000,00	27,73
8	Beban Tunj. Beras PNS	114.859.000,00	113.451.000,00	1,24
9	Beban Uang Makan PNS	327.690.000,00	306.640.000,00	6,86
10	Beban Tunjangan Umum PNS	25.790.000,00	27.420.000,00	(5,94)
11	Beban Uang Lembur	0,00	0,00	
12	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	
Total		5.635.354.900,00	4.702.680.000,00	19,83

Beban Persediaan
Rp 68.217.000,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 68.217.000,00 dan Rp 62.692.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 22. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	68.217.000,00	62.692.500,00	8,81
2	Beban Persediaan Lainnya	0,00	0,00	-
Total		68.217.000,00	62.692.500,00	8,81

Beban Barang dan
Jasa Rp
836.956.783,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 836.956.783,00 dan Rp 918.501.662,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang

timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

1	Beban Keperluan Perkantoran	685.738.395,00	591.276.795,00	15,98
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.804.500,00	16.971.500,00	(18,66)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	82.404.000,00	44.400.000,00	85,59
4	Beban Barang Operasional Lainnya	29.687.500,00	87.109.700,00	(65,92)
5	Beban Penanganan Pandemi	0,00	2.821.300,00	(100,00)
6	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	
7	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	
8	Beban Langganan Listrik	0,00	165.284.941,00	(100,00)
9	Beban Langganan Telepon	1.081.128,00	967.166,00	11,78
10	Beban Langganan Air	566.260,00	525.260,00	7,81
11	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	
12	Beban Jasa Konsultan	0,00	0,00	
13	Beban Sewa	23.675.000,00	8.675.000,00	172,91
14	Beban Jasa Penanganan Pandemi	0,00	170.000,00	
15	Beban Jasa Lainnya	0,00	300.000,00	
Total		836.956.783,00	918.501.662,00	(8,88)

Beban
Pemeliharaan Rp
869.709.985,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 869.709.985,00 dan Rp 955.058.700,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Beban Perjalanan Dinas Rp 21.626.900,00

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	555.476.900,00	601.428.000,00	(7,64)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	110.667.000,00	102.034.700,00	8,46
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	203.491.085,00	226.029.500,00	(9,97)
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	75.000,00	25.566.500,00	(99,71)
Total		869.709.985,00	955.058.700,00	(8,94)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 77.093.117,00 dan Rp 88.891.447,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 641.716.871,00

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	77.093.117,00	88.891.447,00	(13,27)
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0,00	0,00	
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0,00	0,00	
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota			
5	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	
Total		77.093.117,00	88.891.447,00	(13,27)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 641.716.871,00 dan Rp 632.275.639,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	263.268.944,00	253.827.712,00	3,72
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	378.447.927,00	378.447.927,00	-
3	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan		641.716.871,00	632.275.639,00	1,49
				#DIV/0!
1	Beban Amortisasi Software			#DIV/0!
2	Beban Amortisasi Lisensi	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	#DIV/0!
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	#DIV/0!
Total		641.716.871,00	632.275.639,00	1,49

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	-	#DIV/0!
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	#DIV/0!
3	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-	#DIV/0!
4	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-	#DIV/0!
Total		-	-	#DIV/0!

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp 0,00

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 28. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			#DIV/0!
2	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-		#DIV/0!
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	#DIV/0!
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL			#REF!
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	#DIV/0!
6	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	#DIV/0!
7	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	-	-	#DIV/0!
Total		-	-	#DIV/0!

0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp
14.663.522.351,0
0

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 14.663.522.351,00 dan Rp 15.151.561.343,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO Rp
(8.119.648.641,0
0)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp (8.119.648.641) dan Rp (7.278.985.070). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp
0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp 0,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain
Rp 0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0,00 dan Rp 0,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah di Pengadilan Negeri Lubuklinggau per 31 Desember 2019, berupa Temuan BPK RI Tahun 2019 yang belum selesai di Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Temuan BPK RI Tahun 2022	-
Total		-

E.6 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas Rp
8.407.413.770,00

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 8.407.413.770 dan Rp 6.834.229.478. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.351.701.184,00
Diterima dari Entitas Lain	(12.160.414,00)
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	-
	8.339.540.770,00

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp (12.160.414) sedangkan DKEL sebesar Rp 8.351.701.184,00.

E.6.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 14.303.173.680,00 dan Rp 14.951.287.480 dan Rp 14.663.522.351.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2023 pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2023.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan pemeriksaan BPK RI atas pengadaan barang/jasa pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menuntut penyelesaian berupa pengembalian oleh Pihak Ketiga ke Kas Negara

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2023 MA RI berfungsi sebagai koordinator yaitu menerima uang persediaan (UP) yang kemudian langsung didistribusikan seluruhnya sesuai dengan UP.

Dalam mengelola UP yang diberikan, Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau MA RI menyimpan sisa uang UP/TUP pada brankas dan virtual akun. Pada tahun 2022, virtual akun yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau MA RI sebagai berikut:

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Unit Kerja	Nomor Rek BRI	Tanggal Pembukaan Rekening
1	Penampung DIPA BUA	653240989701000	S-896/WPB.12/KP.06/2023
2	Penampung DIPA BADILUM	654450992291000	S-896/WPB.12/KP.06/2023
3	Penampungan Perkara	1130014635480	S-384/WPB.07/KP.05/2022

1. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAIBA 2023.

2. Tidak Ada Perbaikan Transaksi SPM/SP2D

Bagan Akun Standar					
BAS Semula		Nilai Semula	BAS Koreksi		Nilai Koreksi
Satker	: 663157	Rp 15.923.520	Satker	: 663157	Rp 15.923.520
KPPN	: 175		KPPN	: 175	
Akun	: 522112		Akun	: 522113	
Program	: 1070		Program	: 1070	
Kegiatan/Output	: 1070.994		Kegiatan/O	: 1070.994	
Sumber Dana	: 01		Sumber Da	: 01	
Cara Tarik	: 0		Cara Tarik	: 0	
Register P/H	: 00000001		Register P/	: 00000001	
Kewenangan	: KP		Kewenang	: KP	
Lokasi	: 01.51		Lokasi	: 01.51	
Total		Rp 15.923.520	Total		Rp 15.923.520

3. Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : SK-23/Pengadilan Negeri Lubuklinggau.3/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : SK-337/Pengadilan Negeri Lubuklinggau.3/KPA/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Pejabat Penandatanganan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menunjuk,

Kuasa Pengguna Anggaran	: PATRA SUKMA, S.Kom., S.H., M.H
Pejabat Pembuat Komitmen	: ANDERIANSYAH, S.Kom., M.A.P
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: MULYATI, S.Sos
Bendahara Pengeluaran	: MUTHIA FADILAH, A.Md
Bendahara Penerimaan	: RUSMAN EDWAR, S.Kom.
Operator SIMAK BMN	: INTAN APRILIA PUTRI,A.Md.S.I.
Operator SAIBA / PERSEDIAAN	: INTAN APRILIA PUTRI,A.Md.S.I.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU 098970

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 8:50 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	8,397,210,000	8,351,701,184	(45,508,816)	99	6,882,835,000	6,780,903,038	(101,931,962)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

PATRA SUKMA S.KOM., S.H., M.H
197907092009041002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (098970) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:49 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,663,522,351	15,151,561,343	(488,038,992)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,119,648,641)	(7,278,985,070)	(840,663,571)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(43,353,400)	43,353,400	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	(29,860,000)	29,860,000	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(13,493,400)	13,493,400	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8,407,413,770	6,834,299,478	1,573,114,292	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	287,765,129	(488,038,992)	775,804,121	-
EKUITAS AKHIR	14,951,287,480	14,663,522,351	287,765,129	-

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

PATRA SUKMA S.KOM., S.H., M.H

197907092009041002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (098970) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 8:50 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	80,000	80,000	0	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	80,000	80,000	0	0.00
ASET TETAP				
Tanah	7,065,673,000	7,065,673,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,346,716,757	2,549,335,757	797,381,000	31.28
Gedung dan Bangunan	8,659,430,000	8,659,430,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	228,341,630	228,341,630	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,347,771,427)	(3,826,677,556)	(521,093,871)	13.62
JUMLAH ASET TETAP	14,952,389,960	14,676,102,831	276,287,129	1.88
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	39,532,500	39,532,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(39,532,500)	(39,532,500)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	14,952,469,960	14,676,182,831	276,287,129	1.88
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,182,480	12,660,480	(11,478,000)	(90.66)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,182,480	12,660,480	(11,478,000)	(90.66)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,182,480	12,660,480	(11,478,000)	(90.66)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,951,287,480	14,663,522,351	287,765,129	1.96
JUMLAH EKUITAS	14,951,287,480	14,663,522,351	287,765,129	1.96
JUMLAH EKUITAS	14,951,287,480	14,663,522,351	287,765,129	1.96
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,952,469,960	14,676,182,831	276,287,129	1.88

Keterangan :
FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

PATRA SUKMA S.KOM., S.H., M.H
197907092009041002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (098970) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:48 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,160,414	11,526,060	634,354	5.504
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,160,414	11,526,060	634,354	5.504
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	12,160,414	11,526,060	634,354	5.504
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,638,115,299	4,633,091,182	1,005,024,117	21.692
Beban Persediaan	68,217,000	62,692,500	5,524,500	8.812
Beban Barang dan Jasa	836,956,783	918,501,662	(81,544,879)	(8.878)
Beban Pemeliharaan	869,709,985	955,058,700	(85,348,715)	(8.936)
Beban Perjalanan Dinas	77,093,117	88,891,447	(11,798,330)	(13.273)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (098970) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:48 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	641,716,871	632,275,639	9,441,232	1.493
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	8,131,809,055	7,290,511,130	841,297,925	11.54
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,119,648,641)	(7,278,985,070)	(840,663,571)	11.549
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,119,648,641)	(7,278,985,070)	(840,663,571)	11.549
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,119,648,641)	(7,278,985,070)	(840,663,571)	11.549

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

PATRA SUKMA S.KOM., S.H., M.H

197907092009041002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1100 **SUMATERA SELATAN**
SATUAN KERJA : 098970 **PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/02/24 8:51 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 19/2/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,862,812,000	1,898,329,000	1,898,312,900	0	1,898,312,900	100	16,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,000	32,000	29,989	267	29,722	93.72	2,278
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	186,283,000	143,738,000	143,736,954	0	143,736,954	100	1,046
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	51,638,000	47,886,000	47,884,906	0	47,884,906	100	1,094
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,400,000	40,320,000	40,320,000	0	40,320,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,978,530,000	2,714,200,000	2,714,200,000	0	2,714,200,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	308,515,000	322,527,000	322,526,093	0	322,526,093	100	907
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	104,451,000	114,859,000	114,858,120	0	114,858,120	100	880
511129	Belanja Uang Makan PNS	286,440,000	327,690,000	327,665,000	0	327,665,000	99.99	25,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	28,420,000	25,790,000	25,790,000	185,000	25,605,000	100	185,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4,843,520,000	5,635,371,000	5,635,323,962	185,267	5,635,138,695	100	232,305
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	10,589,000	10,588,800	0	10,588,800	100	200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1,000	124	0	124	12.4	876
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	290,000	289,680	0	289,680	99.89	320
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	2,642,000	1,960,000	0	1,960,000	74.19	682,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	14,922,000	14,238,604	0	14,238,604	95.42	683,396
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,843,520,000	5,650,293,000	5,649,562,566	185,267	5,649,377,299	99.99	915,701
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	668,510,000	687,122,000	685,738,395	0	685,738,395	99.8	1,383,605
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	36,000,000	17,148,000	14,020,500	0	14,020,500	81.76	3,127,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82,404,000	82,404,000	82,404,000	0	82,404,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	22,300,000	29,754,000	29,687,500	0	29,687,500	99.78	66,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	809,214,000	816,428,000	811,850,395	0	811,850,395	99.44	4,577,605
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,669,000	6,669,000	6,125,000	0	6,125,000	91.84	544,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,669,000	6,669,000	6,125,000	0	6,125,000	91.84	544,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63,420,000	68,320,000	68,292,000	0	68,292,000	99.96	28,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	63,420,000	68,320,000	68,292,000	0	68,292,000	99.96	28,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1100 **SUMATERA SELATAN**
SATUAN KERJA : 098970 **PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/02/24 8:51 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 19/2/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	26,400,000	26,400,000	1,081,128	0	1,081,128	4.1	25,318,872
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	12,000,000	566,260	0	566,260	4.72	11,433,740
522141	Belanja Sewa	37,400,000	23,900,000	23,675,000	0	23,675,000	99.06	225,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	5,600,000	700,000	0	0	0	0	700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	81,400,000	63,000,000	25,322,388	0	25,322,388	40.19	37,677,612
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	604,614,000	555,600,000	555,476,900	0	555,476,900	99.98	123,100
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	110,700,000	110,700,000	110,667,000	0	110,667,000	99.97	33,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	162,160,000	203,720,000	203,491,085	0	203,491,085	99.89	228,915
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	877,474,000	870,020,000	869,634,985	0	869,634,985	99.96	385,015
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,350,000	77,350,000	77,093,117	0	77,093,117	99.67	256,883
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	77,350,000	77,350,000	77,093,117	0	77,093,117	99.67	256,883
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,915,527,000	1,901,787,000	1,858,317,885	0	1,858,317,885	97.71	43,469,115
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	346,380,000	845,130,000	844,006,000	0	844,006,000	99.87	1,124,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	346,380,000	845,130,000	844,006,000	0	844,006,000	99.87	1,124,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	346,380,000	845,130,000	844,006,000	0	844,006,000	99.87	1,124,000
	JUMLAH BELANJA	7,105,427,000	8,397,210,000	8,351,886,451	185,267	8,351,701,184	99.46	45,508,816

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : 098970 PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 19/02/24 8:57 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251 425131	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9,660,000	12,160,414	0	12,160,414	125.88
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	9,660,000	12,160,414	0	12,160,414	125.88
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	9,660,000	12,160,414	0	12,160,414	125.88
	JUMLAH PENDAPATAN	9,660,000	12,160,414	0	12,160,414	125.88

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (098970) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:50 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	80,000	0
0.0	131111	Tanah	7,065,673,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,346,716,757	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,659,430,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	228,341,630	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,293,383,508
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,054,387,919
0.0	162151	Software	39,532,500	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	39,532,500
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	1,182,480
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	8,351,701,184
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	12,160,414	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	38,873,000
0.0	391111	Ekuitas	0	14,663,522,351
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	29,000,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	12,160,414
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,898,312,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	29,722	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	143,736,954	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	47,884,906	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,714,200,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	322,526,093	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	114,858,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	316,403,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	25,605,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	10,588,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	124	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,400,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	289,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,960,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	685,738,395	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,804,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	82,404,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	29,687,500	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,081,128	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	566,260	0
3.0	522141	Beban Sewa	23,675,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (098970) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:50 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	555,476,900	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	110,667,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	203,491,085	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	77,093,117	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	263,268,944	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	378,447,927	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	68,217,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	75,000	0
JUMLAH			27,483,743,356	27,483,743,356

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

PATRA SUKMA S.KOM., S.H., M.H

197907092009041002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (098970) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:50 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	8,351,701,184
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	12,160,414	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	12,160,414
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,898,312,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29,989	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	143,736,954	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	47,884,906	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,714,200,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	322,526,093	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	114,858,120	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	327,665,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,790,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	10,588,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,400,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289,680	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,960,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	685,738,395	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,020,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82,404,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	29,687,500	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,125,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	68,292,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,081,128	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	566,260	0
3.0	522141	Belanja Sewa	23,675,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	555,476,900	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	110,667,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	203,491,085	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,093,117	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	844,006,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	267
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
JUMLAH			8,364,046,865	8,364,046,865

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

PATRA SUKMA S.KOM., S.H., M.H

197907092009041002